

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Seiring adanya perubahan sistem pemerintahan dari era orde baru ke era reformasi, memberi kesempatan munculnya otonomi daerah yang ditandai dengan adanya peralihan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan dibidang pendapatan anggaran atau keuangan baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahunnya pemerintah daerah melakukan rencana keuangan tahunan yang tercantum dalam APBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pembangunan daerahnya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat (Huda dan Sumiati, 2019).

Saat ini, negara sedang aktif dalam membangun kesadaran peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan dorongan yang lebih kuat dan lebih cepat bagi pergerakan ekonomi bangsa (Idrus, 2013). Disilah peran pemerintah dapat dijelaskan dengan meningkatkan potensi daerah dan pengelolaan sumber daya manusia yang berguna masyarakat.

Tingkat penyerapan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sering kali menjadi poin terpenting yang diperbincangkan oleh para pemerhati ekonomi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai indikator kegagalan birokrasi. Salah satu faktor penyebab kurang maksimal kinerja pemerintah daerah yang telah ditargetkan adalah rendahnya penyerapan anggaran. Tidak terserapnya anggaran secara maksimal dapat menyebabkan hilangnya manfaat belanja, karena pemerintah tidak menggunakan seluruh dana yang dialokasikan atau terdapat dana yang menganggur.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan salah satu Pemerintah Daerah yang mengalami masalah pencapaian realisasi belanja yang belum mencapai target. Realisasi belanja sejumlah pemerintah daerah di Sumatera

Selatan masih tergolong rendah. Dalam Media Indonesia (2021), Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan bahwa penyebab lambatnya serapan anggaran di beberapa wilayah terjadi karena lambatnya proses tender. Untuk itu, setiap daerah harus segera memaksimalkan serapan anggaran di waktu yang tersisa. Hingga September 2021, realisasi belanja sejumlah pemerintah bahkan masih ada yang dibawah 50%.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dalam Media Indonesia (2021), ada delapan daerah yang realisasi belanjanya masih dibawah 50%. Diantaranya, Kota Palembang 49,19% dan Lubuk Linggau 41,38%. Kemudian, Kabupaten Empat Lawang 46,15%, Pali 45,60%, Banyuasin 45,56%, Lahat 43,94%, Ogan Ilir 43,54% dan yang paling rendah Musi Rawas Utara 37,74%.

Sementara serapan belanja tertinggi dilakukan Kabupaten Musi Banyuasin dengan capaian 78,69%. Disusul Kabupaten OKU Selatan 60,61%, OKU Timur 55,88%, Musi Rawas 55,53%, Kota Pagaralam 52,11%, OKU 51,05%, Muara Enim 51%, OKI 50,92%. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan APBD Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja. Dimana untuk total pendapatan mencapai Rp25,3 Triliun. Sementara total realisasi belanja hanya mencapai Rp21,59 Triliun. Bisa dikatakan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah yang belum tersalurkan. Masalah ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mengelola keuangan daerah agar APBD dapat bergerak cepat ditengah kondisi pertumbuhan yang lambat ini (Anggi dkk. 2019).

Menurut Kemendagri (2021) bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki serapan anggaran belanja yang rendah, tingkat penyerapan anggaran pada Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) dengan nilai rata-rata sebesar 89,45%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: LKPD Sumatera Selatan, diolah peneliti (2023)

Gambar 1.1
Tingkat Penyerapan Anggaran di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017-2021

Jika ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158, kinerja penganggaran dinilai baik apabila kementerian negara/lembaga memiliki persentase penyerapan anggaran paling sedikit sebesar 95%. Provinsi Sumatera Selatan memiliki rata-rata sebesar 89,45%. Dampak dari serapan anggaran yang rendah tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Penyerapan anggaran yang rendah justru dinilai kurang baik, karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran misalnya penggelembungan (*mark-up*) belanja dari belanja wajarnya atau mungkin banyaknya program yang tidak dijalankan.

Pemerintah daerah membuat anggaran belanja setelah diperoleh secara pasti dari mana sumber pendanaannya. Besaran pendapatan akan berpengaruh dalam menentukan besaran alokasi belanja termasuk didalamnya belanja modal. Dalam penggunaan belanja modal, pemerintah harus mampu mengelolanya agar terserap dengan baik. Sesuai tujuan dari otonomi daerah, belanja modal memiliki peran penting sebagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam penelitian Kurniawan (2012), jumlah belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2011 pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang.

Selain belanja modal, penyerapan anggaran terkait belanja barang dan jasa merupakan salah satu cara dalam membangkitkan perekonomian bangsa. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting, karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan. Pembangunan diartikan dalam berbagai kebijakan, program, dan proyek-proyek. Proyek termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang mana sistem dan proses pengelolaannya akan secara langsung dan signifikan mempengaruhi tingkat kesuksesan maupun kegagalan pembangunan (Siregar, 2008). Dalam penelitian yang dilakukan Ratag dkk. (2019) menjelaskan bahwa belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Universitas Sam Ratulangi.

Begitu pula dengan belanja tak terduga, dimana pemanfaatan APBD di setiap daerah memiliki proporsi yang berbeda tergantung prioritas masing-masing daerah. Namun dengan adanya kejadian tak terduga mengakibatkan Sumatera Selatan harus menyesuaikan APBD, anggaran belanja tidak terduga menjadi hal yang menarik dibicarakan karena alokasi anggaran banyak digunakan untuk membiayai kegiatan penanganan seperti kebutuhan mendesak yang tak terduga akibat pandemi Covid-19 atau bencana tak terduga lainnya (Aprilia, 2022).

Berdasarkan fenomena penyerapan anggaran pemerintah daerah khususnya yang terjadi di Indonesia. Peneliti tertarik melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga Terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

2. Apakah Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Belanja Tak Terduga berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga, dan Penyerapan Anggaran. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2017-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Tak Terduga terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, khususnya mengenai pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga terhadap Penyerapan Anggaran.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga terhadap Penyerapan Anggaran dan menjadi referensi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan anggaran sehingga dapat memaksimalkan penyerapan anggaran.

3. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada peneliti lainnya khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Akuntansi Sektor Publik.